



**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Dibuat oleh:

Berliana Rahmiyati

022117180

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2022



**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DI KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Jumat, 1 Juli 2022

Berliana Rahmiyati

022117180

Disetujui

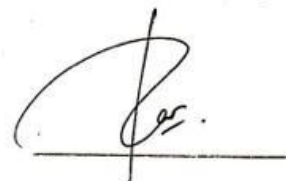
Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak. M.M.CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Ernadi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE.,
CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Mutlara Puspa Widyowati S.E., M.Acc., Ak)



LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Nama : Berliana Rahmiyati

NPM : 0221 17 180

Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan
Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Berliana Rahmiyati

0221 17 180

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

BERLIANA RAMIYATI 022117180 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor. Dibawah bimbingan ERNADHI SUDARMANTO dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI

Kinerja keuangan daerah merupakan segala bentuk pencapaian atau prestasi dari pengelolaan keuangan dan segala sumber kekayaan daerah dalam mewujudkan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya kinerja keuangan akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu visi misi dan kesejahteraan daerah. Masyarakat menuntut agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan jujur, akuntabilitas dan transparansi perlu dilakukan karena akan menciptakan sistem akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan yang baik serta jujur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara melakukan penyebaran 100 kuesioner yang disebar secara langsung. Data diuji dengan menggunakan SPSS 25 uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas uji hipotesis yaitu uji analisis regresi linear berganda serta uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor tetapi transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Hasil pengujian secara simultan dengan uji f yaitu pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan Atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, dan tidak lupa shalawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad SAW, atas kehendak Allah SWT pula lah penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Proposal Penelitian ini dengan judul “Analisa Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bogor”

Tujuan dari penulisan Proposal Penelitian ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih sedikit. Walaupun demikian penulis mengharapkan proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bantuan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada orang – orang yang telah berjasa dalam kaitannya dengan penulisan ini, yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan.
2. Kepada kedua orang tua dan adik saya, yang tiada hentinya memberikan kasih sayangnya, doa, dukungan, perhatian serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Agung Fajar Ilmiyono S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA. Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Ernandhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE, CFA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak saran dengan penuh kesabaran, mengarahkan penulis proposal penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik.

8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E.,M.Acc.,Ak selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, mengarahkan, dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.
9. Bapak Ir. Zul Azhar, MM. Selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan doa dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
11. Kepada Rachmel, Rara, Ninda, Resma, Neng Feb, Neng Rop, Vira, Gaya, Neni, Tina, Alwi, Dyah Ratna Gumilar A.Md log. Aulia Riszky Savanna A.Md. dan seluruh teman-teman kelas E Akuntansi 2017 terima kasih atas kebersamaannya semala perkuliahan ini terimakasih karena kalian kuliah saya menjadi lebih berwarna, terimakasih selalu berbagi ilmu dan membantu saya.
12. Untuk Choi Wooshik dan Seventeen beserta jajaran actor dan idol lainnya yang selalu menemani dan menghibur walaupun hanya menonton di you tube.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan terselesaikannya penulisan ini.
14. *Last but not least. I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis meminta maaf jika ada kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan proposal penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi, harapannya proposal penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang membacanya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini.

Bogor, Juni 2022

Penulis

Berliana Rahmiyati

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR HAK CIPTA.....	iii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Akademis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Agensi	8
2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2.3 Akuntabilitas	12
2.4 Transparansi	14

2.5 Kinerja Keuangan	16
2.6 Penelitian Terdahulu.....	17
2.7 Kerangka Pemikiran	30
2.7.1 Pengaru Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	30
2.7.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	30
2.7.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	30
2.7.4 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	31
2.8 Hipotesis Penelitian	32
BAB 3	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.2.1 Objek.....	33
3.2.2 Unit Analisis	33
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Penelitian.....	33
3.4 Operasional Variabel.....	33
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	35
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	36
3.7.1 Uji Coba Instrumen.....	37
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	39
3.7.5 Koefisien Determinasi	39
3.7.6 Uji Statistik f.....	39
3.7.7 Uji Statistik t.....	40
BAB 4	41
HASIL PENELITIAN.....	41

4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	41
4.2	Pemerintahan Kabupaten Bogor.....	41
4.2.1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.....	42
4.2.2	Inspektorat Kabupaten Bogor	43
4.2.3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor	43
4.2.4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	44
4.2.5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor	44
4.2.6	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor	45
4.3	Hasil Pengumpulan Data	45
4.3.1	Karakteristik Respoden.....	45
4.4	Hasil Uji Coba Instrumen.....	47
4.5	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	48
4.6	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	49
4.7	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	52
4.8	Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	52
4.9	Hasil Uji Statistik f.....	53
4.10	Hasil Uji Statistik t	54
4.11	Pembahasan	55
BAB 5	59
KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 3. 2 Jumlah Kuesioner Penelitian.....	36
Tabel 4. 1 Sampel dan Responden Penelitian.....	46
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	46
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik	53
Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik t.....	54
Tabel 4. 12 Hasil Hipotesis Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konstelasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian BPKAD Kabupaten Bogor.....	63
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor.....	64
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Inspektorat Kabupaten Bogor	65
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian BAPPENDA Kabupaten Bogor	66
Lampiran 5 Surat Izin BKPSDM Kabupaten Bogor.....	67
Lampiran 6 Surat Izin BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor	68
Lampiran 7 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di BPKAD	69
Lampiran 8 Surat Pelaksanaan di Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor	70
Lampiran 9 Surat Pelaksanaan Penelitian di BAPPENDA, BAPPEDALITBANG, BKPSDM	71
Lampiran 10 Kuesioner Penelitian.....	72
Lampiran 11 Hasil Kuesioner Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	76
Lampiran 12 Hasil Kuesioner Akuntabilitas (X2)	79
Lampiran 13 Hasil Kuesioner Transparansi (X3)	82
Lampiran 14 Hasil Kuesioner Kinerja Keuangan (Y).....	85
Lampiran 15 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	88
Lampiran 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Beranda.....	91

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab (Lazyra, 2016). Diterapkannya otonomi daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya (Wiguna dan Jati, 2019)

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah setiap pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan kewenangan yang menjadi hukum daerahnya. Pemerintah daerah juga dapat menjajaki manfaat pembangunan daerahnya sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah daerah diminta untuk produktif dan imajinatif dalam mengembangkan kemampuan daerah untuk memajukan kinerja daerahnya, baik kinerja non keuangan maupun kinerja keuangannya. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah pusat telah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya, pembagian itu sendiri berupa pembagian keuangan, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerahnya.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan, dan keuangan. Inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah (Lazyra, 2016). Otonomi daerah dan desentralisasi ini memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah (Fiqri dan Sari, 2018).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan, kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan

suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun (Nasution, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah (Yatminiwati, 2018). Untuk mewujudkan *good governance* perubahan terus dilakukan pada sektor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah dan didukung dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, selain itu membawa kosekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien. Dengan pengalokasian dana yang baik, maka akan berimplikasi pada pembangunan daerah yaitu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Setiyanningrum, 2017).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek – aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggung jawaban (Husain, dalam Shara, Ovami dan Humairah, 2020).

Transparansi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta implementasi kebijakan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab

tuntutan perubahan secara efektif. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Lastri and Gunawan, 2020).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga semua kegiatan pengelolaan keuangan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum. Besarnya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah mengenai pertanggungjawaban kinerja keuangannya, mengharuskan pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Untuk menilai baik buruknya kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan, mengatur dan mengalokasikan keuangan daerahnya dapat dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Sari, 2016).

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat disebut sebagai hasil dari sistem pengelolaan keuangan dalam arti tingkat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah daerah sebagai gambaran tentang visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan ditentukan dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan tidak hanya terikat dengan pengelolaan keuangan tetapi juga dengan akuntabilitas dan transparansi karena akan menciptakan sistem akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan yang baik (Nasution, 2018).

Rakyat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah (Nasution, 2018). Pemerintahan dikatakan baik apabila dapat mengolah keuangan dengan baik dan dapat mensejahterakan rakyatnya secara keseluruhan. Tuntutan kinerja keuangan yang baik tentunya terjadi disemua daerah termasuk di Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Adanya peningkatan volume penyelenggaraan pemerintah daerah yang membuat sistem pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan dan perbaikan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam menyikapi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu pemerintah dituntut untuk siap dalam menghadapi pedoman penyusunan APBD yang baru, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 harus menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun 2020 terutama berkenaan dengan keterpaduan dan sinkronisasi visi misi program Bupati dan wakil Bupati (Andi, 2019). Perubahan ini bisa terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Dalam menyikapi paket perubahan regulasi tersebut pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dituntut untuk dapat memenuhi semua tahapan dan jadwal penyusunan KUA/PPAS pada penyusunan APBD, pihak – pihak yang

terlibat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menetapkan APBD secara tepat waktu, melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, membuat kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan metode penyusunan APBD secara tepat waktu, dan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai yang ditetapkan dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada pemerintah.

Walaupun banyaknya tekanan dan tantangan dari adanya perubahan paket regulasi tersebut pemerintah Kabupaten Bogor lima kali berturut – turut dari tahun 2016 – 2020 mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah cukup baik (Tim Komunikasi Publik, 2021) . Namun apa yang menjadi faktor dari keberhasilan tersebut apakah ada pengaruh dari pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penerapan berbagai aturan perundang – undangan yang terkait dengan konsep pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar dapat mempengaruhi kinerja keuangan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

Beberapa penelitian yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah. Nasution (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Esni (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Putri dan Subardjo (2017) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berpengaruh positif signifikan.

Dari adanya fenomena tersebut menjadikan dasar dan alasan sebagai peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Faktor – faktor yang digunakan dalam penelitian ini pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution (2018) Faktor yang membedakan dalam penelitian ini adalah faktor lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya berlokasi di OPD Sumatera Utara, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan volume penyelenggaraan pemerintah daerah yang membuat sistem pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan dan perbaikan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam menyikapi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan yaitu pemerintah dituntut untuk siap dalam menghadapi pedoman penyusunan APBD yang baru, Perubahan ini bisa terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Dalam menyikapi paket perubahan regulasi tersebut pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dituntut untuk dapat memenuhi semua tahapan dan jadwal penyusunan KUA/PPAS pada penyusunan APBD, pihak – pihak yang terlibat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menetapkan APBD secara tepat waktu, melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, membuat kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan metode penyusunan APBD secara tepat waktu, dan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai yang ditetapkan dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada pemerintah.

Walaupun banyaknya tekanan dan tantangan dari adanya perubahan paket regulasi tersebut pemerintah Kabupaten Bogor berturut – turut dari tahun 2016 - 2020 mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Namun apa yang menjadi faktor dari keberhasilan tersebut apakah ada pengaruh dari pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar dapat mempengaruhi kinerja keuangan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor?

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor?
4. Apakah pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan anatar variabel – variabel penelitian yaitu hubungan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah, hubungan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah, dan hubungan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hubungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mendapatkan hasil kinerja yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Terlebih lagi untuk menjadikan pemerintah daerah menjadi pemerintahan yang bersih dan jujur serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah

1. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor.
2. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor.
3. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor.
4. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bogor

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan, berikut kegunaan – kegunaan penelitian.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Selain itu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai variabel – variabel yang diteliti yaitu Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi. Penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan dibidang pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keruangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada pemerintahan Kabupaten Bogor mengenai Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini nantinya diharapkan agar mampu memberikan pandangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang juga diharapkan mampu menjauhkan dari tindakan –tindakan yang melanggar perundang – undangan.

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mengembangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi aparat pemerintah daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agens*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, dalam Husain (2018)). Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan antara prinsipal dan agen.

Menurut Setiawan, dalam Husain (2018) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen – komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agen.

Dari sudut pandang teori keagenan diatas hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen, Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain – lain). Sebagai wujud pertanggung jawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap prinsipal (Santoso dan Pambelum, dalam Husain, (2018)). Agen merupakan penerima tanggung jawab dan prinsipal ialah pemberi tanggung jawab. Teori keagenan (*agency theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah – masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Untuk itu, konsep pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi dapat dijelaskan menggunakan *agency theory* dimana pemerintah sebagai pemegang amanat dan masyarakat sebagai *prinsipal*.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 menyatakan bahwa; (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam APBD. (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dilakukan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan pendapatan umum daerah dan belanja daerah dalam rangka desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Pemungutan pendapatan dari seluruh daerah bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD. Demikian pula dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua pengeluaran dan kontak daerah yang mengenakan pajak kepada daerah dilakukan sesuai dengan besaran dan tujuan yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga merupakan dasar pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian Pengelolaan keuangan daerah menurut Rulyanti (2018) pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur daerah dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Liow, Kindangen dan Engka (2019) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat

meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun (Nasution, 2018). Hal ini didukung dengan pendapat Abdul Halim yang menyatakan “Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi”.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah yang harus dilakukan pejabat daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah terkadang menjadi topik yang dibicarakan dalam konteks sektor publik, pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, sebaliknya jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Husain, 2018). Pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum bisa memaksimalkan kemampuan daerah yang dimiliki atau dalam kata lain masih belum mampu membiayai pengeluaran daerahnya sendiri, sehingga mau tidak mau masih terus bergantung pada kucuran anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Liow, Kindangen and Engka, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan perencanaan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah, ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman rencana kerja pemerintah daerah membuat rencana strategis (Renstra-SKPD) kemudian pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu satu tahun. Pemerintah daerah setiap tahunnya akan menyusun rencana pembangunan daerah yang dimuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kemudian diajukan dan dibahas bersama legislative untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah APBD ditetapkan selanjutnya PPKD memberitahu kepada semua kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) rancangan ini merinci sasaran yang hendak dicapai seperti fungsi, program, kegiatan, anggaran yang telah disediakan untuk mencapai sasaran tersebut.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini bendahara penerima dan pengeluaran wajib menyeleggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Bendahara penerima dan pengeluaran dibantu oleh pembantu bendahara penerima dan pengeluaran untuk dibantu tugas – tugas kebidaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPKD menerbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) dengan mempertimbangkan penjawalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.

4. Tahap Pelaporan dan Petanggung Jawaban

Pada tahap ini penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelola. Laporan keuangan yang disiapkan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan keuangan disertai laporan ikhtisar realisasi kinerja, laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

5. Tahap Pengawasan

Pada tahap ini keuangan daerah meliputi pembinaan dan pengawasan, pengendalian intern, dan pengendalian eksteren. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pencapaian sasaran telah ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Halim, dalam Liow, Kindangen dan Engka, (2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah :

- a. Akuntabilitas. Prinsip pertanggung jawaban kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban seta pengawasan.
- b. Transparansi. Prinsip ini memiliki hak dan akses masyarakat dalam mengetahui informasi dan proses anggaran yang dilakukan aparatur daerah.

- c. *Value For Money*. Prinsip ini menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama (Mardiasmo, dalam Putri dan Subardjo, 2017), yaitu

1. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value
2. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

2.3 Akuntabilitas

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

Pengertian akuntabilitas menurut Setiyanningrum (2017) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Menurut pendapat Novatiani, Kusumah dan Vabiani (2019) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan. Kesadaran akuntabilitas pada seorang pegawai akan berpengaruh dalam melakukan pekerjaannya dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Ademirna (2016) akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai

kewajiban – kewajiban dari individu – individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber - sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Hal ini didukung dengan adanya teori keagenan yang memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal yang menuntut pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh individu atau unit organisasi untuk mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, dan juga sebagai pengungkapan kebijakan dan perencanaan dalam suatu pencapaian tujuan.

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu (Ademirna, 2016). Akuntabilitas sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik (Setiyanningrum, 2017)

Menurut Putri dan Subardjo (2017) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktivitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Husain, 2018)

Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus di hormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik (Qodariah, 2017). Menurut Mardiasmo dalam Qodariah (2017) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accoutability for probity and legality*)
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jumlah adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di syartkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses memanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Program accountability disini dan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcwcs and effectivencs*).
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan manfaatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

2.4 Transparansi

Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Pengertian transparansi menurut Setiyanningrum (2017) adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut pendapat Novatiani, Kusumah dan Vabiani (2019) Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

Menurut Qodariah (2017) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan daerah bersih, efektifitas, efisiensi, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Hal ini didukung teori Mardiasmo yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan transparansi adalah keterbukaan informasi secara jujur tentang penyelenggaraan pemerintah kepada publik yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Menurut Putri dan Subardjo (2017) dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

- i. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- ii. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- iii. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.

- iv. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Menurut Mardiasmo dalam Qodariah (2017) karakteristik transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:

- a. Informatif (*infonnativeness*)
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- b. Keterbukaan (*openness*)
Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh pengguna informasi publik, selain dari informasi yang di kecualikan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Pengungkapan
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial.

2.5 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja menurut Putri dan Subardjo (2017) kinerja merupakan prestasi yang dapat dan harus dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menunjukkan seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Menurut Lazyra (2016) Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan – tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Kinerja keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Nasution, 2018). Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber – sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut kinerja pemerintah

daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah (Wiguna dan Jati, 2019).

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah segala bentuk pencapaian atau prestasi dari pengelolaan keuangan dan segala sumber kekayaan daerah dalam mewujudkan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya kinerja keuangn akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu visi misi dan kesejahteraan suatu daerah.

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Lazyra, 2016).

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Ademirna (2016) Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Indikator Masukan (*Inputs*)
Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Indikator Proses (*Process*)
Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Indikator Keluaran (*Output*)
Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
- d. Indikator Hasil (*Outcome*)
Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- e. Indikator Manfaat (*Benefit*)
Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Adapun penelitian terhadap variabel-variabel yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
		<p>Variabel Moderasi Akuntabilitas</p> <p>Variabel Dependen : Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya nilai material kecurangan • Kecilnya atau rendahnya nilai material kecurangan • Harus ada komitmen yang kuat. • Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya. • Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. • Berorientasi kepada pencapaian visi dan misi. • Serta hasil dan manfaat yang diperoleh. <p>Melaporkan informasi keuangan.</p>		<p>pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Lingkungan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Akuntabilitas merupakan variabel moderasi dalam interaksi antara akuntabilitas dan kinerja keuangan dimana interaksi keduanya berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.</p>

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					Opini audit bukan merupakan variabel moderasi dalam interaksi antara akuntabilitas dan opini audit dimana interaksi keduanya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.
2	Lazyra KS Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan (2016)	Variabel Independen : Rasio Keuangan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian • Rasio Efektifitas • Rasio Efisiensi • Rasio Keserasian Modal • Rasio Pertumbuhan Pendapatan 	Penelitian Deskriptif	Kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan
3	Irna Setiyanningrum Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah	Variabel Independen: Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi • Standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. • Akurasi dan 	analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda	Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money.

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
	(BUMD) di Yogyakarta (2017)	<p>Transparansi</p> <p>Pengawasan</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Anggaran</p>	<p>kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan • Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil <ul style="list-style-type: none"> • Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. • Adanya akses Masyarakat terhadap transparansi anggaran. • Adanya audit yang independen dan efektif. • Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. <ul style="list-style-type: none"> • Input (masukan) pengawasan • Proses pengawasan • Output (keluaran) <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) • Kualitas pelayanan (efektivitas) 		<p>Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja</p> <p>Variabel pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money.</p> <p>Variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan berpengaruh positif dan</p>

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money.
4	Lailatul Qodariah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang (2017)	<p>Variabel Independen: Akuntabilitas</p> <p>Transparansi</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (accountability for probity and legality) • Akuntabilitas Proses (Process Accountability) • Akuntabilitas Program (Program Accuonfability) • Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) • Informatif. • Keterbukaan • Pengungkapan • Input • Proses • Output 	Analisis regresi linear berganda	<p>Akuntabilitas anggaran berbasis kineja menunjukkan bahwa variabel tersebut berpcngaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.</p> <p>Transparansi anggaran berbasis kineja menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.</p> <p>Akuntabilitas anggaran bcrbasi kineja, Transparansi anggaran bcrbasi kineja, secara simultan berpengaruh terhadap Kincrja Dinas Kebersihan</p>

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					dan Keindahan Kota Palembang.
5	Ridha Rahmadita Putri dan Anang Subardjo Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran pada Sektor Publik (2017)	<p>Variabel Independen : Akuntabilitas</p> <p>Transparansi</p> <p>Pengawasan</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kejujuran dan hukum • Akuntabilitas proses • Akuntabilitas program • Akuntabilitas kebijakan • Kualitas informasi pengelolaan anggaran • Kebebasan arus informasi. • Input (masukan) • Proses • Pengawasan • Output (keluaran) pengawasan. <p>Ekonomis, Efisien dan Efektivitas.</p>	Analisis linear berganda	<p>Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran adalah signifikan dan positif</p> <p>Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran adalah signifikan dan positif.</p> <p>Hasil pengujian menunjukkan pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran adalah signifikan dan positif.</p> <p>Secara simultan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran</p>
6	Vivid Annisa Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,	Variabel Independen: Sistem akuntansi keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas • Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas • Prosedur Akuntansi Aset Tetap 	analisis regresi berganda	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (2017)	Pengelolaan keuangan daerah Good Governance Variabel Dependen : Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Akuntansi Selain Kas, dan Penyajian Laporan Keuangan. • Perencanaan • Pelaksanaan APBD • Pelaporan, Pertanggungjawaban • Pengawasan. • Accountability (Akuntabilitas) • Responsibility (Tanggung Jawab) • Transparency (Keterbukaan) • Fairness (Keadilan) • Masukan • Proses • Keluaran • Hasil • Manfaat • Dampak. 		signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Good Governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
7	Asep Asrudin Fiqri dan Imelda Sari Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah	Variabel Independen: Pengelolaan keuangan daerah Sistem pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> • Transparan • Keadilan • Tertib • Taat pada peraturan perundangundangan • Efisien • Ekonomis • Efektif • Bertanggung jawab • Lingkungan pengendalian • Penafsiran resiko 	Pengujian secara parsial	Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Sistem pengendalian intern

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Daerah Kabupaten Bogor (2018)	Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi dan komunikasi akuntansi • Aktivitas pemantauan pengendalian • Perencanaan • Investigasi • Pengkoordinasian • Evaluasi • Pengawasan • Pemilihan Staff • Negosiasi • Perwakilan 		pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
8	Dito Aditia Darma Nasution Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan (2018)	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas Transparansi Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Efektifitas dan Efisiensi <ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas untuk kejujuran dan legalitas • Akuntabilitas proses • Akuntabilitas kinerja program • Akuntabilitas kebijakan • Informatif • Keterbukaan • Pengungkapan <p>Masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.</p>	Uji t Uji simultan Uji koefisien determinasi	Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Transparansi berpengaruh secara signifikan Secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
9	<p>Maria Trimurni Esni Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang (2019)</p>	<p>Variabel Independen: Penerapan Anggaran berbasis kinerja</p> <p>Akuntabilitas</p> <p>Transparansi</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan • Keluaran • Hasil • Manfaat • Dampak <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran penyalahgunaan keuangan • Kepatuhan terhadap hukum • Proses dan pertanggungjawaban anggaran • Pertimbangantujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. • Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat • Sistem keterbukaan kebijakan anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen anggaran mudah diakses • Laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu • Suara rakyat terakomodasi • Sistem pemberian informasi kepada publik <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Efisiensi • Efektifitas 	<p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>Tidak ada pengaruh yang signifikan antara transparansi terhadap kinerja keuangan</p> <p>Variabel penerapan anggaran</p>

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
10	Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, dan Diandra Pepi Vabiani Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (2019)	<p>Variabel Independen: Akuntabilitas</p> <p>Transparansi</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>• Kejujuran dan hukum</p> <p>• Proses</p> <p>• Program</p> <p>• Kebijakan</p> <p>• Komunikasi publik oleh pemerintah</p> <p>• Hak masyarakat terhadap akses informasi</p> <p>• Masukan (input)</p> <p>• Proses (process)</p> <p>• Keluaran (output)</p>	penelitian eksplanatori	<p>Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.</p> <p>Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.</p> <p>Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat</p>
11	Meilany S.D. Liow, Paulus Kindangen, dan Daisy S.M. Engka Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan	<p>Variabel Independen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan</p>	Efektifitas dan Efisiensi	Analisis regresi linear berganda	Pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas dan Efisiensi secara simultan

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis atau subyek yang diteliti, data yang diteliti dan metode yang digunakan. Yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu pengelolaan keuangan dengan penelitian Liow, Kindangen dan Engka (2019), Annisa (2017), Nasution (2018) dan penelitian Fiqri dan Sari (2018) Persamaan pada variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi juga terdapat pada penelitian Putri dan Subardjo (2017), Esni (2019), Nasution (2018), Setiyanningrum dan Isroah (2017), (Qodariah (2017), Novatiani, Kusumah dan Vabiani (2019), Shara, Ovami dan Humairah (2020). Persamaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan terdapat pada penelitian Nasution (2018) dan Esni (2019).

Memiliki perbedaan variabel penelitian yang digunakan oleh Ademirna (2016) yaitu variabel independen kinerja keuangan daerah dan variabel moderasi akuntabilitas. Sedangkan pada penelitian ini memiliki variabel independen akuntabilitas dan tidak memakai variabel moderasi. Perbedaan pada metode penelitian yang digunakan oleh Lazyra (2016), dan Novatiani, Kusumah dan Vabiani (2019). Perbedaan unit analisis penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan yang dilakukan Setiyanningrum dan Isroah (2017) dan Qodariah (2017).

Tabel 2. 2

Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Dependen	
	Kinerja Keuangan	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Pengelolaan Keuangan Daerah	Annisa (2017), Liow, Kindangen dan Engka (2019). (Fiqri dan Sari, 2018)	
Akuntabilitas	Putri dan Subardjo (2017), Novatiani, Kusumah dan Vabiani (2019), Esni (2019).	
Transparansi	Putri dan Subardjo (2017), Nasution (2018), dan Novatiani, Kusumah Vabiani (2019).	Esni (2019) dan Shara, Ovami dan Humairah, (2020).

2.7 Kerangka Pemikiran

2.7.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan penelitian dari Nasution (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, dalam penelitiannya pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menandakan bahwa jika pengelolaan keuangan daerah ditingkatkan maka dapat mendorong kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik, pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Sebaliknya jika pengelolaan keuangan daerah buruk akan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun (Nasution, 2018). Hal ini didukung dengan pendapat Abdul Halim yang menyatakan “Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi”.

H1 : Pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

2.7.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan penelitian Esni (2019) yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja keuangan. Akuntabilitas mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena akuntabilitas sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi pemerintah daerah dengan cara meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, jika pemerintah mampu menerapkan pertanggungjawabannya dengan baik atau mengolah keuangan dengan terbuka terhadap masyarakat maka kinerja keuangan akan meningkat. Hal ini didukung dengan adanya teori keagenan yang memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal yang menuntut pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan.

H2 : Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

2.7.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan penelitian Putri dan Subardjo (2017) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran adalah signifikan positif. Transparansi dapat diartikan

sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, hal ini didukung teori Mardiasmo yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Dengan transparansi yang dilakukan secara baik dan transparan akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik kepada pemerintah maka kinerja keuangan akan meningkat.

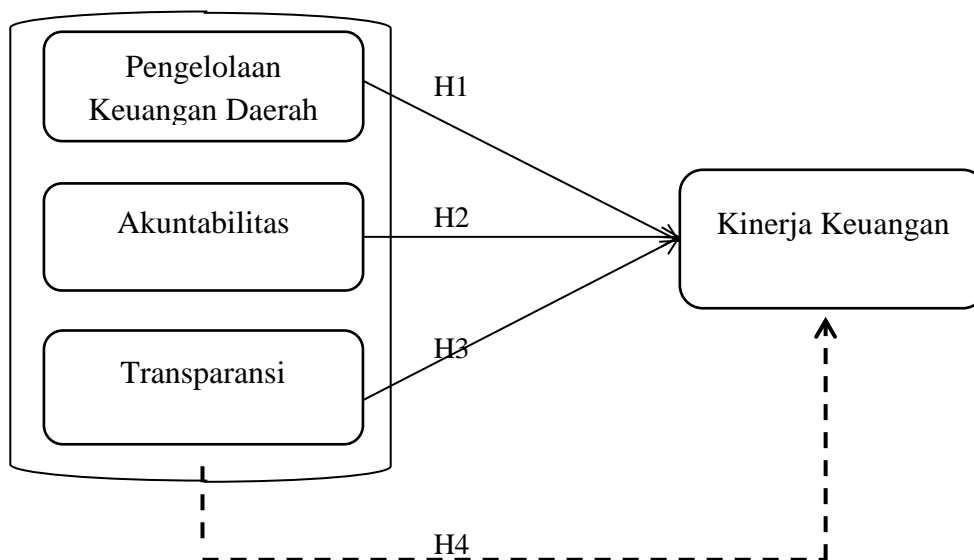
H3 : Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

2.7.4 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan penelitian Nasution (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu instansi pemerintah juga dapat disebut sebagai hasil dari sistem pengelolaan keuangan dalam arti tingkat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah, sebagai gambaran tentang visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setelah pembentukan sistem pengelolaan keuangan, perlu disiapkan alat untuk mengukur kinerja keuangan dan pengawasan pemerintah untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan, kinerja keuangan juga berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, karena akan membentuk sistem akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

H4 : Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

2.8 Hipotesis Penelitian



Gambar 2. 1
Konstelasi Penelitian

Keterangan :

—————> : secara parsial
 - - - - -> : secara simultan

H1 : Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

H2 : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

H3 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

H4 : Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Variabel terkait kinerja keuangan.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek

Objek penelitian ini meliputi variabel X (variabel independen) yaitu pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi serta pengaruhnya terhadap variabel Y (variabel dependen) yaitu kinerja keuangan.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/geografis regional, maksud dari geografis regional adalah wilayah/daerah/negara, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respon) suatu wilayah/daerah/negara tertentu.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan, adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli berupa hasil kuesioner yang disebar ke SKPD Kabupaten Bogor.

3.4 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah (X1), Akuntabilitas (X2), dan Transparansi (X3)

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi penyebab adanya independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu kinerja keuangan (Y).

Tabel 3. 1

Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Pengelolaan Keuangan daerah	Ekonomis	Ekonomis berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu.	Ordinal
	Efisiensi	Efisiensi penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdayaguna.	
	Efektif	Efektif penggunaan anggaran harus mencapai target –target atau tujuan	
Akuntabilitas	Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, akuntabilitas hukum terkait dengan jumlah adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di syaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.	Ordinal
	Akurilabilitas Proses	Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.	
	Akuntabilitas Program	Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, akuntabilitas program disini disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan	
	Akuntabilitas Kebijakan	Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.	
Transparansi	Informatif	Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.	Ordinal
	Keterbukaan	Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada	

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
		di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh pengguna informasi publik.	
	Pengungkapan	Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial.	
Kinerja Keuangan	Masukan (<i>input</i>)	Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran	Ordinal
	Proses (<i>process</i>)	Merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketetapan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan	
	Keluaran (<i>output</i>)	Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik	
	Hasil (<i>outcomes</i>)	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran	
	Manfaat (<i>benefit</i>)	Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan	

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini bersumber dari data primer yang dilakukan dengan menyebar kuesioner ke beberapa perangkat kerja daerah Kabupaten Bogor yang menjadi populasi sekaligus sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh yaitu Teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota dijadikan sampel. (Sugiyono, 2010)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai teori yang relevan dengan penyusunan penelitian ini seperti data yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku dan jurnal ilmiah berupa teori tentang pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan daerah.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode ini dilakukan dengan kuesioner. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar langsung kuesioner yang berisi pernyataan kepada responden. Dalam penelitian ini yang dimaksud responden adalah pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bogor

Tabel 3. 2
Jumlah Kuesioner Penelitian

Variabel	Indikator	Jumlah Pertanyaan
Pengelolaan Keuangan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomis • Efisiensi • Efektifitas 	6
Akuntabilitas (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kejujuran dan hukum • Akuntabilitas proses • Akuntabilitas program • Akuntabilitas kebijakan 	6
Transparansi (X3)	<ul style="list-style-type: none"> • Informatif • Keterbukaan • Pengungkapan 	4
Kinerja Keuangan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Input • Proses • Output • Hasil • Manfaat 	5
Jumlah		21

Kuesioner dalam penelitian ini berjumlah 21 pernyataan. Jenis pertanyaan dalam kuesioner ini memakai analisis deskriptif yang berisi tentang bahasan secara dekriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data/teori yang telah terkumpul. Jenis jawaban untuk kuesioner ini menggunakan skala likert empat angka, perinciannya sebagai berikut :

1. Kategori sangat setuju (SS) diberikan skor 5
2. Kategori setuju (S) diberikan skor 4
3. Kategori netral (N) diberikan skor 3
4. Kategori tidak setuju (TS) diberikan skor 2
5. Kategori sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, Akuntabilitas, dan Tranparansi terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam Microsoft Office Excel 2010 dan diolah dengan

menggunakan program Statistical Product and Service Solution 25 (SPSS). Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

3.7.1 Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan bilvariate correlation antara masing - masing skor indikator dengan correlation. Uji validitas dapat dilihat dari tabel Item-Total Statistic, nilai tersebut kemudian dibandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel. Kuesioner dapat dikatakan valid atau tidaknya ditentukan dengan kriteria menurut (Ghozali, 2016) yaitu:

- 1) Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka instrumen valid
- 2) Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka instrumen tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas akan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan program SPSS 25 for windows. Pengujian dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Alat ukur dapat dikatakan handal apabila kriteria yang digunakan suatu alat ukur memberikan hasil yang stabil (Ghozali, 2016).

Uji reliabilitas dapat digunakan dengan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika Cronbach's Alpha ≥ 0.60 maka alat ukur bersifat reliabel.
2. Jika Cronbach's Alpha < 0.60 maka alat ukur bersifat tidak reliabel.

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif terdiri dari jumlah sampel, range, nilai minimum, nilai maksimum, sum, mean, standar deviasi, variance, Skewness, dan kurtosis. Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis, bagaimana profil dan distribusi variabel-variabel tersebut.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016), menyatakan bahwa “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak, dengan menguji sebaran data yang di analisis. ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini, yaitu :

Uji Kolomogrov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran pada (titik) sumbu diagonal yang terdapat pada grafik. Adapun menurut dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model tidak memenuhi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksud untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen (multikolinieritas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel yang bebas. Multikolinieritas dapat dilihat apabila tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas (Indria, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastik dan jika berbeda disebut heteroskedastik. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastik. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya uji glejser. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan atau mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi (Kinerja keuangan)

A = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (Pengelolaan Keuangan daerah)

X2 = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (Akuntabilitas)

X3 = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (Transparansi)

e = Error

3.7.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berganda (R^2) merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu atau ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.7.6 Uji Statistik f

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sampel variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

- Jika nilai F hitung < F tabel atau sig. > 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, itu berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai F hitung > F tabel atau sig. < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, itu berarti bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.7 Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ dan uji satu sisi sebagai berikut:

- Jika p value atau signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima atau H_0 ditolak, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika p value atau signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, maka H_a tidak dapat diterima atau H_0 diterima, artinya variabel dependen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum. Penelitian ini bersumber dari data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke beberapa perangkat kerja daerah Kabupaten Bogor yang menjadi populasi sekaligus sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota dijadikan sampel (Sugiyono, 2010).

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas 298.838,304 Ha. yang secara administratif terbagi atas 40 Kecamatan. jumlah desa di Kabupaten Bogor sebanyak 417 desa dan 17 Kelurahan, dengan 3882 RW dan 15561 RT. Wilayah Kabupaten Bogor terletak diantara 6°18'0" - 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" - 107°13'30" Bujur Timur dan secara geografis berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi.
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak.
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta.
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
5. Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Secara topografi, bagian utara wilayah kabupaten bogor terletak pada dataran yang relatif rendah, sedangkan di bagian selatan terletak pada dataran tinggi. Sekitar 29,28 persen wilayah berada pada ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut, 19,53 persen pada ketinggian 500 – 1000 meter diatas permukaan laut, 8,43 persen pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter diatas permukaan laut, dan 0,22 persen pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter diatas permukaan laut.

4.2 Pemerintahan Kabupaten Bogor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala kabupaten/kota meliputi Perencanaan dan Pengendalian pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial; Pelayanan bidang tenaga kerja; Fasilitas pembanguana koperasi, usaha kecil dan menengah; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertahanan; Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintah; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas Sekeretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan perumusan kebijakna teknis operasional, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bogor, baikm sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor. Dinas Daerah Kabupaen Bogor yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah. Selain itu, kecamatan dalam wilayah kabupaten bogor yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah.

Adapun sampel dan responden dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor.

4.2.1 Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupatenn Bogor Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Merupakan unsur staf Pemerintah Daerah,dipimpin oleh Sekretariat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi,sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Polisi Pamong Praja, Staf Ahli, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lainnya

3. Pemantuan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah dalam Melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi, Staf Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 12 (duabelas) Bagian, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian. (Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor)

4.2.2 Inspektorat Kabupaten Bogor

Inspektorat Kabupaten Bogor adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

Sedangkan fungsi inspektorat Kabupaten Bogor yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. (Inspektorat Kabupaten Bogor)

4.2.3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
5. Pelaksanaan administrasi Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang. (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.2.4 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappenda memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi
6. Pelaksanaan administrasi Badan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)

4.2.5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor

Membantu Bupati dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
4. Pelaksanaan administrasi Badan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor)

4.2.6 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah. Berdasarkan Perbup tersebut Bappedalitbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappedalitbang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - Pelaksanaan administrasi Badan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor).

4.3 Hasil Pengumpulan Data

4.3.1 Karakteristik Responden

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner secara langsung dengan mendatangi lokasi pengambilan sampel yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Pendapatan daerah Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. Adapun rincian penyebaran kuesioner tersebut dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4. 1
Sampel dan Responden Penelitian

No	Instansi Pemerintah	Responden
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor	15
2	Inspektorat Kabupaten Bogor	10
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor	30
4	Badan Pengelola Pendapatan daerah Kabupaten Bogor	15
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15
6	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	15
	Jumlah	100

Karakteristik responden yang diperoleh melalui kuesioner penelitian mengenai data responden yang meliputi jenis kelamin dan pendidikan. Adapun rincian data responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Percent
Jenis Kelamin	Laki – Laki	58	58%
	Perempuan	42	42%
Pendidikan	SMA/SMK	4	4%
	Diploma (D3)	10	10%
	Sarjana (S1)	83	83%
	Magister (S2)	3	3%

Dari tabel 4.2 dapat menunjukkan informasi bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan informasi bahwa responden yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 58 orang dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan menunjukkan informasi bahwa yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 4 orang, yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 10 orang, yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 83 orang, dan yang berpendidikan Magister (S2) sebanyak 3 orang keseluruhan responden sebanyak 100 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki – laki dan mayoritas pendidikan terakhir Sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pendidikan yang baik dalam menjawab kuesioner.

4.4 Hasil Uji Coba Instrumen

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melaukan *bilvariate correlation* antara masing - masing skor indikator dengan correlation. Uji validitas dapat dilihat dari tabel Item-Total Statistic, nilai tersebut kemudian dibandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel. Kuesioner dapat dikatan valid atau tidaknya ditentukan dengan kriteria menurut (Ghozali, 2016) yaitu jika r hitung $>$ r tabel, maka instrumen valid, jika r hitung $<$ r tabel, maka instrumen tidak valid.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas

Variabel		<i>Corrected item total correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pengelolaan keuangan daerah (X1)	X1.1	0,551	0,164	Valid
	X1.2	0,636	0,164	Valid
	X1.3	0,666	0,164	Valid
	X1.4	0,505	0,164	Valid
	X1.5	0,284	0,164	Valid
	X1.6	0,201	0,164	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,694	0,164	Valid
	X2.2	0,663	0,164	Valid
	X2.3	0,672	0,164	Valid
	X2.4	0,506	0,164	Valid
	X2.5	0,509	0,164	Valid
	X2.6	0,584	0,164	Valid
Transparansi (X3)	X3.1	0,806	0,164	Valid
	X3.2	0,845	0,164	Valid
	X3.3	0,732	0,164	Valid
	X3.4	0,724	0,164	Valid
Kinerja Keuangan (Y)	Y1	0,695	0,164	Valid
	Y2	0,681	0,164	Valid
	Y3	0,717	0,164	Valid
	Y4	0,722	0,164	Valid
	Y5	0,647	0,164	Valid

Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi r hitung pada taraf signifikansi 0,05. Bila koefisien r hitung $>$ r tabel maka alat ukur tersebut valid. r tabel pada penelitian ini adalah 0.164. Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.3 seluruh pertanyaan memiliki r hitung $>$ r tabel yang berarti bahwa seluruh

pernyataan tersebut valid. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas akan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan program SPSS 25 for windows. Pengujian dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Alat ukur dapat dikatakan handal apabila kriteria yang digunakan suatu alat ukur memberikan hasil yang stabil (Ghozali, 2016).

Uji reliabilitas dapat digunakan dengan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika Cronbach's Alpha ≥ 0.60 maka alat ukur bersifat reliabel.
2. Jika Cronbach's Alpha < 0.60 maka alat ukur bersifat tidak reliabel.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Pengelolaan keuangan	0,733	Reliabel
Akuntabilitas	0,834	Reliabel
Transparansi	0,883	Reliabel
Kinerja Keuangan	0,869	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner penelitian reliabel sebagai alat ukur variabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada kuesioner dinyatakan konsisten.

4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada statistik deskriptif terdapat gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan sum. Dalam memberikan gambaran analisis statistic deskriptif dari penelitian ini maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengelolaan Keuangan Daerah	100	13	17	30	25.92	2.684	7.206
Akuntabilitas	100	12	18	30	25.99	2.556	6.535
Transparansi	100	6	14	20	17.65	2.057	4.230
Kinerja Keuangan	100	7	18	25	22.37	2.063	4.256
Valid N (listwise)	100						

Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan deskripsi dari data masing masing variabel sebagai berikut :

1. Jumlah instansi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 instansi dengan total sampel 100 orang (N).
2. Variabel dependen penelitian yaitu kinerja keuangan (Y) memiliki nilai maksimum 25 dan nilai minimum 18, mean/rata – rata dari kinerja keuangan sebesar 22,37 dengan standar deviation 2,063.
3. Variabel independen penelitian yaitu pengelolaan keuangan daerah (X1) memiliki nilai maksimum 30 dan nilai minimum 17, mean/rata – rata dari kinerja keuangan sebesar 25,92 dengan standar deviation 2,684.
4. Variabel independen penelitian yaitu akuntabilitas (X2) memiliki nilai maksimum 30 dan nilai minimum 18, mean/rata – rata dari kinerja keuangan sebesar 25,99 dengan standar deviation 2,556.
5. Variabel independen penelitian yaitu transparansi (X3) memiliki nilai maksimum 20 dan nilai minimum 14, mean/rata – rata dari kinerja keuangan sebesar 17,65 dengan standar deviation 2,057.

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016), menyatakan bahwa “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak, dengan menguji sebaran data yang di analisis.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,83487610
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,075
	Negative	-,059
Test Statistic		0,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,188 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Uji Kolmogorov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 1,88. Dikarenakan nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat sigifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,188 > 0,05$) maka berarti data terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dimaksud untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen (multikolinieritas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel yang bebas. Multikolinieritas dapat dilihat apabila tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan ada kasus multikolinearitas, Nilai VIF yang tidak lebih besar dari 10 diindikasikan tidak ada kasus multikolinearitas.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Multikolinearitas

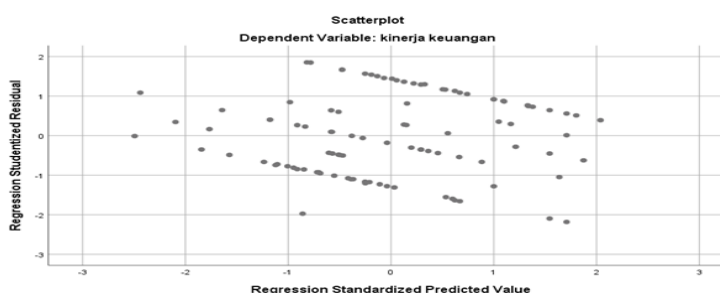
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pengelolaan keuangan	0,908	1.101
	akuntabilitas	0,884	1.131
	transparansi	0,842	1.188

Berdasarkan data olahan pada Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung multikolinearitas, artinya pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastik dan jika berbeda disebut heteroskedastik. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastik. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya uji glejser. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Gambar 4. 1
Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas



Hasil dari pengujian heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa titik-titik telah menyebar secara merata baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan tersebarnya titik tersebut, maka dapat disimpulkan tidak ada terjadinya heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi layak dipakai dalam mengetahui faktor – faktor variabel X yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan atau mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dimana pada penelitian ini variabel independennya adalah pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,384	2,396		4,334	0,000
	pengelolaan keuangan daerah	0,156	0,064	0,230	2,414	0,018
	akuntabilitas	0,223	0,078	0,276	2,857	0,005
	transparansi	0,128	0,099	0,128	1,290	0,200
a. Dependent Variable: kinerja keuangan						

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut berikut.

$$Y = 10,384 + 0,156X_1 + 0,223X_2 + 0,128X_3 + e$$

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien regresi dari pengelolaan keuangan adalah 0,156 akuntabilitas adalah 0,223 , dan transparansi adalah 0,128. Diketahui nilai koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

4.8 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi berganda (R²) merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu atau ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 9
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,457 ^a	0,209	0,184	1,86333
a. Predictors: (Constant), transparansi, pengelolaan keuangan, akuntabilitas				

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,457 atau 45,7% hal ini berarti kinerja keuangan di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh variabel pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi sebesar 45,7% dan sisanya 54,3% dipengaruhi oleh indikator dan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.9 Hasil Uji Statistik f

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sampel variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

- Jika nilai F hitung < F tabel atau sig. > 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, itu berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai F hitung > F tabel atau sig. < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, itu berarti bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	88,000	3	29.333	8,449	0,000 ^b
	Residual	333,310	96	3,472		
	Total	421,310	99			
a. Dependent Variable: kinerja keuangan						
b. Predictors: (Constant), transparansi, pengelolaan keuangan, akuntabilitas						

Dari hasil tabel 4.14 f hitung 8,449 > f tabel 2,70 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 maka H4 yang diajukan diterima artinya Pengelolaan Keuangan

Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

4.10 Hasil Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ dan uji satu sisi sebagai berikut:

- Jika p value atau signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima atau H_0 ditolak, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika p value atau signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, maka H_a tidak dapat diterima atau H_0 diterima, artinya variabel dependen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,384	2,396		4,334	0,000
	pengelolaan keuangan daerah	0,156	0,064	0,230	2,414	0,018
	akuntabilitas	0,223	0,078	0,276	2,857	0,005
	transparansi	0,128	0,099	0,128	1,290	0,200
a. Dependent Variable: kinerja keuangan						

Berdasarkan tabel menghasilkan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai t hitung $2,414 > 1,660$ dan memiliki nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ maka H_1 diterima yang artinya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.
2. Akuntabilitas memiliki nilai t hitung $2,857 > 1,660$ dan memiliki nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ maka H_2 diterima yang artinya akuntabilitas

berepengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

3. Transparansi memiliki nilai t hitung $1,290 < 1,660$ dan memiliki nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka H_3 ditolak yang artinya transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

4.11 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah (H_1) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor, Akuntabilitas (H_2) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor, Transparansi (H_3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi (H_4) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor. Berikut hasil hipotesis penelitian ini:

Tabel 4. 12
Hasil Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	Diterima
H2	Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	Diterima
H3	Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	Ditolak
H4	Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor	Diterima

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji parsial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pencapaian tujuan pemerintah memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah harus ekonomis, efisiensi, dan efektif untuk mengelola sumber daya atau kekayaan daerah yang dimiliki, dana masyarakat, dan dana anggaran yang dimiliki hal itu bertujuan agar memberikan keluasaan kepada suatu daerah dalam mengatur sendiri urusan pemerintahnya hal ini sesuai dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah pusat telah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik maka kinerja keuangan akan meningkat karena pengelolaan keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja keuangan. Nasution (2018) dalam penelitiannya menyatakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait langsung dengan kinerja keuangan artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah semakin baik. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor sudah cukup baik dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah hal itu terbukti dari predikat yang didapat Kabupaten Bogor selama 5 tahun berturut – turut yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, ditengah tekanan yang setiap tahun selalu berganti sistem pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dituntut untuk siap dalam menghadapi pedoman penyusunan APBD yang baru. walau ditengah Pandemi Covid 19 Kabupaten Bogor juga berhasil meraih predikat WTP. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan bisa menjadi dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Sari (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Pada penelitian yang dilakukan Liow, Kindangen dan Engka (2019) menghasilkan pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan akan meningkat apabila pertanggung jawaban pemerintah sepenuhnya diterapkan dengan baik. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor karena dapat mempengaruhi kinerja keuangan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan cara meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Putri dan Subardjo (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja anggaran yang baik dibutuhkan pertanggung jawaban anggaran agar menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan, semakin kuat penerapan akuntabilitas maka semakin tinggi kinerja keuangan.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban dari individu, kelompok, atau organisasi pada setiap penganggaran yang dilakukan dimulai dari

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di Kabupaten Bogor sudah cukup baik karena sudah memiliki kriteria dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan Esni (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Malang jika pemerintah mampu menerapkan pertanggung jawabannya dengan baik, atau mengelola keuangan daerah dengan terbuka terhadap masyarakatnya, maka kinerja keuangan pun meningkat.

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang jelas dan jujur kepada publik untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai dengan dilakukan transparansi, publik akan memperoleh informasi tersebut. Menurut Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam hal ini transparansi mengenai informasi keuangan di Kabupaten Bogor belum cukup baik karena masih kurangnya keterbukaan dalam mendapatkan informasi keuangan. Bagi aparat pemerintah data keuangan dipandang sebagai rahasia negara dan tidak semua masyarakat berhak mengetahui kecuali dengan kepentingan tertentu. Hal ini sesuai dengan penelitian Esni (2019) yang menyatakan bahwa transparansi bukanlah menjadi tolak ukur yang pasti untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, walaupun dengan adanya transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan tetapi tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka peningkatan kinerja keuangan di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya dilakukan melalui transparansi karena masih kurangnya keterbukaan dalam informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Esni (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara transparansi terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Malang, sama halnya di Kabupaten Bogor penerapan transparansi bukan menjadi satu – satunya ukuran dalam menilai kinerja keuangan.

4. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji simultan hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor. Dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa secara bersama – sama penerapan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bogor dengan begitu dalam meningkatkan kinerja keuangan diperlukan faktor pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini membuktikan selain erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan kinerja keuangan juga berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi karena akan membentuk sistem akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah jika dilakukan dengan baik akan mempengaruhi kinerja keuangan dan kesejahteraan daerahnya sedangkan akuntabilitas dan transparansi diperlukan karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat serta memberikan informasi yang terbuka dengan begitu pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nasution (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor.
3. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Bogor.

5.2 Saran

1. Saran yang diberikan peneliti secara akademik yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi pengembangan teori pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, dan secara praktisi manfaat yang diberikan kepada instansi yaitu untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah perlu diperhatikan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bogor perlu meningkatkan transparansi karena pada dasarnya keuangan daerah adalah dana publik yang setiap masyarakat berhak mengetahui, melalui peningkatan sistem keterbukaan kebijakan anggaran, laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu dan sistem pemberian informasi kepada publik.
2. Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu disarankan untuk menambah instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti observasi dan wawancara karena metode pengumpulan data melalui kuesioner sering menimbulkan masalah, serta menambah beberapa variabel independen lain sehingga dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah juga dipengaruhi oleh variabel – variabel independen lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademirna, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Opini Audit, dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi pada Skpd Kabupaten Gowa). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Annisa, V., Darlis, E. dan Al Azhar, A. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Riau University.
- Esni, M. T., Made, A. Wulandari, R. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2).
- Fiqri, A. A. dan Sari, I. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Majalah Sainstekes*, 5(2).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 8th edn. Semarang: Universitas Dipenogor.
- Husain, N. (2018). Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indria, N. A. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta.
- Lastri, S. dan Gunawan, B. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor DPR Aceh). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*.
- Lazyra KS (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.
- Liow, M. S. D., Kindangen, P. dan Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota - Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo, A. S. P. (2018). Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah, *Jurnal*

Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), pp. 149–162.

- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R. dan Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS*, 10(1), pp. 51–62.
- Putri, R. R. dan Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik : *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(12).
- Qodariah, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A. dan Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening, *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), pp. 323–335.
- Sari, I. P., Agusti, R. dan Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). Riau University.
- Setiyanningrum, I. dan Isroah, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta, *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).
- Shara, Y., Ovami, D. C. dan Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai, *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), pp. 13–17.
- Sugiyono, D. (2010). Metodologi Penelitian Bisnis, *Alf. Bandung*.
- Wiguna, K. A. dan Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), pp. 85–108.
- Yatminiwati, M. (2018). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa:(Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang). *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(1), pp. 48–55.
- Tim Komunikasi Publik. (2021). Kabupaten Bogor Kembali Raih Predikat WTP Enam Kali Berturut-Turut Dari BPK RI, DISKOMINFO KAB.BOGOR. Available at: [https://bogorkab.go.id/post/detail/kabupaten-bogor-kembali-raih-predikat-wtp-enam-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri#:~:text=BANDUNG-Pemerintah Kabupaten \(Pemkab\),berturut-turut mendapatkan predikat serupa.](https://bogorkab.go.id/post/detail/kabupaten-bogor-kembali-raih-predikat-wtp-enam-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri#:~:text=BANDUNG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab),berturut-turut mendapatkan predikat serupa.(diakses : 24 May 2021).) (diakses : 24 May 2021).

Andi. (2019). Bupati Bogor Buka sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Diskominfo Kabupaten Bogor. Available at: <https://diskominfo.bogorkab.go.id/bupat-bogor-buka-sosialisasi-paket-regulasi-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/> (diakses : 19 October 2020).

www.bogorkab.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Available at: <https://setda.bogorkab.go.id/> (diakses : 9 April 2022).

Inspektorat Kabupaten Bogor.(Available at: <http://inspektorat.kotabogor.go.id/auth/tentangkami> (diakses : 9 April 2022).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor. Available at: bkpsdm.bogorkab.go.id/tupoksi/ (diakses : 9 April 2022).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Available at: <https://bpkad.bogorkab.go.id/tugas-dan-fungsi/> (diakses : 9 April 2022).

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Available at: bappenda.bogorkab.go.id (Accessed: 9 April 2022).

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Available at: bappedalitbang.bogorkab.go.id (diakses : 9 April 2022).

Republik Indonesia. (2004). Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia (2014).Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian BPKAD Kabupaten Bogor



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1143 /WD.1/FEB-UP/XI/2021
Lampiran : 18 November 2021
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data
Kepada : Yth. Pimpinan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
Jl. Aman No.1 Tengah Cibinong Bogor
Jawa Barat 16914.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Berliana Rahmiyati
NPM : 022117180
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 145 /WD.1/FEB-UP/II/2022 12 Februari 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner
 Kepada : Yth. Pimpinan
 SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR
 Jl. Tegar Beriman Kelurahan Tengah Cibinong 16914

Dengan hormat,

Schubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Berliana Rahmiyati
 NPM : 022117180
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan




Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
 2. Arsip.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Inspektorat Kabupaten Bogor

	Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS <small>S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"</small> <small>Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)</small>
---	---

Nomor	: 145 /WD.1/FEB-UP/II/2022	12 Februari 2022
Lampiran	:	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner	
Kepada	: Yth. Pimpinan INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR Jl. Indah Nomor 1, Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor Cibinong Bogor, 16914	

Dengan hormat,



Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa	: Berliana Rahmiyati
NPM	: 022117180
Jurusan	: Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
2. Arsip
- 3.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febekonomi@umpak.ac.id

Scanned by TapScanner

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian BAPPENDA Kabupaten Bogor



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 145 /WD.I/FEB-UP/II/2022 12 Februari 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner
 Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Berliana Rahmiyati
 NPM : 022117180
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
 2. Arsip.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 5 Surat Izin BKPSDM Kabupaten Bogor



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 145 /WD.1/FEB-UP/II/2022 12 Februari 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner
 Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN PEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Jl. Bersih Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Berliana Rahmiyati
 NPM : 022117180
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
 2. Arsip.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febekonomi@unpak.ac.id

Scanned by TapScanner

Lampiran 6 Surat Izin BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SI Manajemen "Terakreditasi A" SI Akuntansi "Terakreditasi A"
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 145 /WD.I/FEB-UP/II/2022 12 Februari 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner

Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN
 Jl. Segar III Kav 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor, Cibinong- Bogor,
 Jawa Barat 16414

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Berliana Rahmiyati
 NPM : 022117180
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
 2. Arsip.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 7 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Nomor : 070 / 2019 - Bakesbangpol
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Cibinong, 23 November 2021

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
 di
 Cibinong

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang :

Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 1143/WD.1/FEB-UP/XI/2021, Tanggal 18 November 2021. Perihal Permohonan Riset/Magang/Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **BERLIANA RAHMIYATI**
 Alamat : Bogor Asri Blok AA.13 No. 2/3 RT 007 RW 009, Kel/Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
 Penanggung Jawab : Dr. Retno Martanti Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM
 Judul Penelitian : Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
 Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
 Waktu : 24 November 2021 s.d 24 Desember 2021
 Tempat : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Lampiran 8 Surat Pelaksanaan di Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Nomor : 070 / 2022 - Bakesbangpol Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Penelitian	Cibirong, 29 Maret 2022 Kepada Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong
--	--

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 145/WD.1/FEB-UP/II/2022, Tanggal 12 Februari 2022. Perihal Permohonan Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **BERLIANA RAHMIYATI**
 Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143
 Penanggung Jawab : Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM
 Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
 Waktu : Maret 2022 s.d Mei 2022
 Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari tempat lokasi penelitian setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**A.N KEPALA BADAN
KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK,**



ASEP NURDIN, S.SOS., MA
PEMBINA
NIP. 196711101991021006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Lampiran 9 Surat Pelaksanaan Penelitian di BAPPENDA, BAPPEDALITBANG, BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 04 Maret 2022

Nomor : 070 / 219 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Bogor
2. Kepala Bappenda
Kabupaten Bogor
3. Kepala BKPSDM
Kabupaten Bogor

di
Cibinong

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 145/WD.1/FEB-UP/II/2022, Tanggal 12 Februari 2022. Perihal Permohonan Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **BERLIANA RAHMİYATI**
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143
Penanggung Jawab : Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : Maret 2022 s.d Mei 2022
Tempat : 1. Bappedalitbang Kab. Bogor
2. Bappenda Kab. Bogor
3. BKPSDM Kab. Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari tempat lokasi penelitian setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Lampiran 10 Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN “PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN,
AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DI DAERAH KABUPATEN BOGOR”**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan di Daerah Kabupaten Bogor” kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya.

Terkait hal tersebut perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab penelitian ini, maka semua data dan informasi dijamin kerahasiaannya.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Peneliti

(Berliana Rahmiyati)

I. Data Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data saya memerlukan jawaban Bapak/Ibu sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut dan memberi tanda check list (√) sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu

1. Nama :
2. Jenis kelamin : () Laki – laki () Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : () SMA/ sederajat () Diploma/D3
() Sarjana/S1 () Magister/S2

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

3. Sebelum menjawab kuesioner dimohon untuk melengkapi identitas responden dengan diri Bapak/Ibu
4. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang tersedia. Terdapat lima alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS) : Skor 5

Setuju (S) : Skor 4

Netral (N) : Skor 3

Tidak Setuju (TS) : Skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1

5. Setiap pernyataan hanya boleh diisi satu jawaban. Jawablah sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sehingga tidak mengosongkan jawaban

Pengelolaan Keuangan (X1)

No	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	N	TS	STS
1	Melakukan pengelolaan keuangan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan					
2	Program kerja dikelola secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan anggaran					
3	Melakukan pengelolaan keuangan secara efisien agar tercapai tujuan pemerintah					
4	Program kerja yang dilaksanakan dikelola menggunakan anggaran secara efisien					
5	Melakukan pengelolaan keuangan secara efektif agar semua program mencapai target					
6	Program kerja dilakukan secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan					

Akuntabilitas (X2)

No	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	N	TS	STS
1	Menggunakan akuntabilitas kejujuran sebagai dasar dalam bekerja					
2	Merancang anggaran sesuai dengan aturan hukum					
3	Melakukan pengelolaan keuangan mengikuti proses dan prosedur yang berlaku					
4	Membuat alternatif program lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan					
5	Kepala badan dan pegawai mempertanggung jawabkan hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan					
6	Kepala badan dan pegawai selalu terlibat bersama – sama dalam mengevaluasi program/kegiatan					

Transparansi (X3)

No	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	N	TS	STS
1	Membuat informasi yang jujur serta mudah dimengerti untuk publik					
2	Informasi yang diberikan berupa laporan keuangan yang meliputi : LRA, neraca, laporan organisasi, laporan perubahan ekuitas dan CALK					

3	Keterbukaan memberikan hak kepada setiap masyarakat untuk memperoleh data dengan mengakses di badan publik					
4	Pengungkapan yang jujur atas segala aktivitas dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih					

Kinerja keuangan (Y)

No	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kemandirian keuangan daerah bisa membiayai penyelenggaraan otonomi daerah					
2	Program dan kegiatan telah dilakukan dan memberikan hasil kinerja keuangan yang baik					
3	Kegiatan yang dilakukan selama satu periode dilaksanakan terstruktur dan dapat mencapai tujuan					
4	Semakin baik kinerja instansi pemerintah maka semakin mudah mencari penyebab kesalahan dalam menjalankan tugas					
5	Penyelenggaraan otonomi daerah dapat mensejahterakan masyarakat					

Lampiran 11 Hasil Kuesioner Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
1	Perempuan	Sarjana	5	4	4	5	4	4
2	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	4	4
3	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	5	5
4	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	5
5	Perempuan	SMA/SMK	5	5	4	4	4	3
6	Perempuan	SMA/SMK	5	4	4	4	4	5
7	Laki - laki	SMA/SMK	5	5	5	4	5	5
8	Laki - laki	SMA/SMK	5	5	5	5	5	5
9	Laki - laki	Magister	5	4	5	5	4	3
10	Laki - laki	Magister	5	5	5	5	4	3
11	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
12	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
13	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4	3
14	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	3	3
15	Laki - laki	Sarjana	3	4	5	4	5	5
16	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	3	3
17	Laki - laki	Sarjana	4	5	5	5	4	4
18	Perempuan	Sarjana	5	4	5	4	4	5
19	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
20	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	5	5
21	Laki - laki	Sarjana	4	5	5	3	3	3
22	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
23	Perempuan	Sarjana	4	3	4	4	4	3
24	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
25	Laki - laki	Sarjana	4	5	5	3	3	3
26	Laki - laki	Sarjana	5	4	5	5	3	3
27	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	4	4
28	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	4	5	5
29	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	4
30	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	3
31	Laki - laki	Sarjana	4	4	3	3	4	4
32	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4	3	3
33	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5	4	4
34	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	4	4
35	Perempuan	Sarjana	4	5	5	4	5	4
36	Perempuan	Sarjana	5	5	4	3	3	3
37	Laki - laki	Sarjana	3	2	2	2	4	4
38	Laki - laki	Magister	5	5	5	5	4	4
39	Laki - laki	Sarjana	4	5	5	3	3	3

40	Perempuan	Sarjana	2	3	1	4	5	5
41	Perempuan	Sarjana	5	4	5	4	5	5
42	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	4	4
43	Perempuan	Sarjana	4	4	4	5	5	5
44	Perempuan	Sarjana	5	4	4	4	4	4
45	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4	4
46	Laki - laki	Sarjana	3	3	3	3	4	4
47	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4	3	3
48	Laki - laki	Diploma	4	4	4	5	3	3
49	Perempuan	Diploma	5	5	5	5	5	5
50	Perempuan	Diploma	4	5	4	5	4	4
51	Perempuan	Diploma	4	4	4	3	4	4
52	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
53	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	5	4	4
54	Laki - laki	Sarjana	5	4	5	5	4	4
55	Laki - laki	Sarjana	5	4	5	4	5	5
56	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4	4	4
57	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
58	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
59	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	4	4
60	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	5
61	Perempuan	Sarjana	5	5	4	4	5	4
62	Perempuan	Sarjana	4	5	5	5	4	4
63	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	5	4
64	Laki - laki	Sarjana	3	4	4	3	4	4
65	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	5
66	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	5
67	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	4	4
68	Perempuan	Sarjana	4	5	5	5	5	5
69	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
70	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	4
71	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
72	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5	4	4
73	Perempuan	Diploma	5	5	5	5	4	4
74	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5	4	4
75	Perempuan	Diploma	5	5	5	5	4	4
76	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
77	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	3
78	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	4
79	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
80	Laki - laki	Sarjana	5	3	5	3	5	4
81	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
82	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	4

83	Laki - laki	Sarjana	3	4	4	3	4	4
84	Perempuan	Sarjana	5	4	5	4	4	4
85	Perempuan	Sarjana	4	5	5	4	5	4
86	Perempuan	Sarjana	4	5	5	5	4	4
87	Perempuan	Sarjana	5	4	4	4	4	4
88	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	3	5	4
89	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	4
90	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5	4	4
91	Laki - laki	Diploma	4	4	4	4	4	3
92	Perempuan	Diploma	4	4	4	4	4	4
93	Perempuan	Sarjana	3	3	3	3	4	3
94	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	3	4	4
95	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	4	4	4
96	Laki - laki	Sarjana	4	3	4	4	3	3
97	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	4
98	Perempuan	Sarjana	3	5	5	5	4	3
99	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	4
100	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	5	5

Lampiran 12 Hasil Kuesioner Akuntabilitas (X2)

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	4	4
2	Perempuan	Sarjana	5	4	4	3	4	4
3	Perempuan	Sarjana	5	5	4	3	4	4
4	Perempuan	Sarjana	4	5	4	4	3	3
5	Perempuan	SMA/SMK	4	4	4	3	5	5
6	Perempuan	SMA/SMK	4	4	4	3	5	5
7	Laki - laki	SMA/SMK	4	4	4	4	4	4
8	Laki - laki	SMA/SMK	5	4	4	3	5	5
9	Laki - laki	Magister	4	4	4	5	5	5
10	Laki - laki	Magister	5	5	5	5	5	5
11	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
12	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	5	4
13	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	5	5
14	Perempuan	Sarjana	4	4	4	3	4	4
15	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	5	5
16	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	5
17	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	4	4
18	Perempuan	Sarjana	5	5	4	3	5	5
19	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	4	4
20	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	4	4
21	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	4	4
22	Perempuan	Sarjana	5	5	5	3	5	5
23	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	5
24	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
25	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	4	4
26	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	3	4	4
27	Perempuan	Sarjana	4	4	4	3	5	5
28	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
29	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	5	5
30	Laki - laki	Sarjana	4	5	5	3	4	4
31	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4	4	4
32	Laki - laki	Sarjana	3	3	3	3	3	3
33	Laki - laki	Sarjana	5	4	5	5	4	4
34	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
35	Perempuan	Sarjana	5	5	4	5	5	4
36	Perempuan	Sarjana	5	4	4	4	4	4
37	Laki - laki	Sarjana	3	3	4	5	5	3
38	Laki - laki	Magister	4	4	4	3	4	3

39	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4	4
40	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	5
41	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	4
42	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
43	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	5
44	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	4	4
45	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
46	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	5	5	5
47	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4	4
48	Laki - laki	Diploma	4	4	5	5	5	5
49	Perempuan	Diploma	4	4	4	4	4	4
50	Perempuan	Diploma	4	4	4	4	4	4
51	Perempuan	Diploma	5	5	5	4	4	4
52	Perempuan	Sarjana	5	4	4	5	4	4
53	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
54	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	5	5	4
55	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
56	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	5
57	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	4	4	4
58	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
59	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	5
60	Perempuan	Sarjana	5	5	4	5	5	5
61	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
62	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
63	Laki - laki	Sarjana	4	4	5	4	4	4
64	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
65	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5	5
66	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
67	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
68	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	5	5
69	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
70	Laki - laki	Sarjana	4	4	5	4	5	5
71	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	4	5	5
72	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4	4	4
73	Perempuan	Diploma	5	5	5	5	5	5
74	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5	5	5
75	Perempuan	Diploma	5	5	5	5	5	5
76	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
77	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	5	5
78	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4
79	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
80	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
81	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4

82	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4	4	4
83	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4	5	5
84	Perempuan	Sarjana	5	5	5	4	4	4
85	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
86	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	5
87	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5	5
88	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	3	5	5
89	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
90	Laki - laki	Diploma	5	5	5	4	4	4
91	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5	5	5
92	Perempuan	Diploma	5	5	4	4	5	5
93	Perempuan	Sarjana	5	5	4	4	5	5
94	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
95	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
96	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5	5
97	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4	4
98	Perempuan	Sarjana	5	5	4	4	5	5
99	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4	4
100	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4	4

Lampiran 13 Hasil Kuesioner Transparansi (X3)

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
1	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
2	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
3	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
4	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
5	Perempuan	SMA/SMK	4	4	4	4
6	Perempuan	SMA/SMK	5	5	5	5
7	Laki - laki	SMA/SMK	5	5	5	5
8	Laki - laki	SMA/SMK	5	5	5	5
9	Laki - laki	Magister	5	5	4	5
10	Laki - laki	Magister	4	4	4	4
11	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5
12	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4
13	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
14	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
15	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4
16	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
17	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4
18	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
19	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
20	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5
21	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5
22	Perempuan	Sarjana	5	5	4	4
23	Perempuan	Sarjana	5	5	4	4
24	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5
25	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5
26	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
27	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
28	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
29	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
30	Laki - laki	Sarjana	4	4	5	5
31	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
32	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
33	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
34	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
35	Perempuan	Sarjana	5	4	3	5
36	Perempuan	Sarjana	4	5	4	4
37	Laki - laki	Sarjana	4	4	3	4
38	Laki - laki	Magister	4	4	3	4

39	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4
40	Perempuan	Sarjana	4	4	3	4
41	Perempuan	Sarjana	5	5	4	5
42	Perempuan	Sarjana	4	4	3	4
43	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
44	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
45	Laki - laki	Sarjana	4	4	3	4
46	Laki - laki	Sarjana	4	4	2	4
47	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
48	Laki - laki	Diploma	4	4	4	4
49	Perempuan	Diploma	4	4	4	4
50	Perempuan	Diploma	4	4	4	4
51	Perempuan	Diploma	4	4	4	4
52	Perempuan	Sarjana	4	4	4	3
53	Laki - laki	Sarjana	4	4	3	5
54	Laki - laki	Sarjana	4	4	3	4
55	Laki - laki	Sarjana	3	4	4	4
56	Laki - laki	Sarjana	4	4	2	4
57	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4
58	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
59	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
60	Perempuan	Sarjana	4	4	2	4
61	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
62	Perempuan	Sarjana	4	4	2	4
63	Laki - laki	Sarjana	4	4	2	4
64	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	4
65	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
66	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
67	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
68	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
69	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
70	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
71	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
72	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
73	Perempuan	Diploma	5	5	5	5
74	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5
75	Perempuan	Diploma	4	4	4	4
76	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
77	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
78	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
79	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
80	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
81	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5

82	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
83	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
84	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
85	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
86	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
87	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4
88	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4
89	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
90	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5
91	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5
92	Perempuan	Diploma	4	4	4	4
93	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
94	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
95	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
96	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5
97	Perempuan	Sarjana	5	5	4	4
98	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5
99	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	5
100	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4

Lampiran 14 Hasil Kuesioner Kinerja Keuangan (Y)

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
1	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
2	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
3	Perempuan	Sarjana	5	4	4	5	5
4	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
5	Perempuan	SMA/SMK	5	4	4	5	5
6	Perempuan	SMA/SMK	5	4	4	5	4
7	Laki - laki	SMA/SMK	4	5	4	5	4
8	Laki - laki	SMA/SMK	4	5	5	5	5
9	Laki - laki	Magister	4	4	4	4	4
10	Laki - laki	Magister	4	4	4	5	4
11	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
12	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4	4
13	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	5
14	Perempuan	Sarjana	4	4	4	5	5
15	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
16	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
17	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4
18	Perempuan	Sarjana	4	5	4	5	4
19	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	4	5
20	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
21	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5	5
22	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
23	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	5
24	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	5
25	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5	5
26	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	4	4
27	Perempuan	Sarjana	4	4	4	5	5
28	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
29	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
30	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4	4
31	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
32	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
33	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4
34	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
35	Perempuan	Sarjana	5	4	5	4	4
36	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
37	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	4	5
38	Laki - laki	Magister	4	4	4	3	3

39	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	5
40	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
41	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
42	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
43	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
44	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
45	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
46	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
47	Laki - laki	Sarjana	4	4	5	4	4
48	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5	5
49	Perempuan	Diploma	4	4	4	4	4
50	Perempuan	Diploma	5	5	5	4	4
51	Perempuan	Diploma	4	4	4	4	4
52	Perempuan	Sarjana	4	4	4	5	5
53	Laki - laki	Sarjana	4	4	5	5	4
54	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	4
55	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
56	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
57	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
58	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	4	4
59	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
60	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
61	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
62	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
63	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
64	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	5	5
65	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
66	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
67	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
68	Perempuan	Sarjana	4	4	4	5	5
69	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
70	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
71	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
72	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
73	Perempuan	Diploma	5	4	5	5	5
74	Laki - laki	Diploma	4	4	4	4	4
75	Perempuan	Diploma	4	5	5	5	5
76	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
77	Laki - laki	Sarjana	4	4	4	4	4
78	Laki - laki	Sarjana	4	5	5	4	4
79	Laki - laki	Sarjana	5	5	4	5	5
80	Laki - laki	Sarjana	4	5	4	5	5
81	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5

82	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
83	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
84	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
85	Perempuan	Sarjana	5	4	4	5	5
86	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
87	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
88	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
89	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	5	5
90	Laki - laki	Diploma	5	5	5	5	5
91	Laki - laki	Diploma	5	4	4	4	5
92	Perempuan	Diploma	4	4	4	4	4
93	Perempuan	Sarjana	4	4	4	4	4
94	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
95	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	5	5
96	Laki - laki	Sarjana	5	4	4	5	5
97	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
98	Perempuan	Sarjana	5	5	5	5	5
99	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5
100	Laki - laki	Sarjana	5	5	5	5	5

Lampiran 15 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.733	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	20.94	6.320	.551	.635
x1.2	20.99	5.828	.636	.601
x1.3	20.93	5.924	.666	.594
x1.4	21.19	6.317	.505	.650
x1.5	21.18	8.533	.284	.756
x1.6	21.37	8.033	.201	.733

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	21.64	4.455	.694	.790
x2.2	21.69	4.539	.663	.797
x2.3	21.77	4.664	.672	.797
x2.4	22.03	4.332	.506	.838
x2.5	21.63	4.660	.590	.811
x2.6	21.69	4.580	.584	.812

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	13.16	2.600	.806	.833

x3.2	13.17	2.607	.845	.823
x3.3	13.44	1.966	.732	.892
x3.4	13.18	2.715	.724	.861

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	17.88	2.794	.695	.840
y.2	17.92	2.822	.681	.844
y.3	17.97	2.797	.717	.835
y.4	17.84	2.701	.722	.833
y.5	17.83	2.809	.647	.852

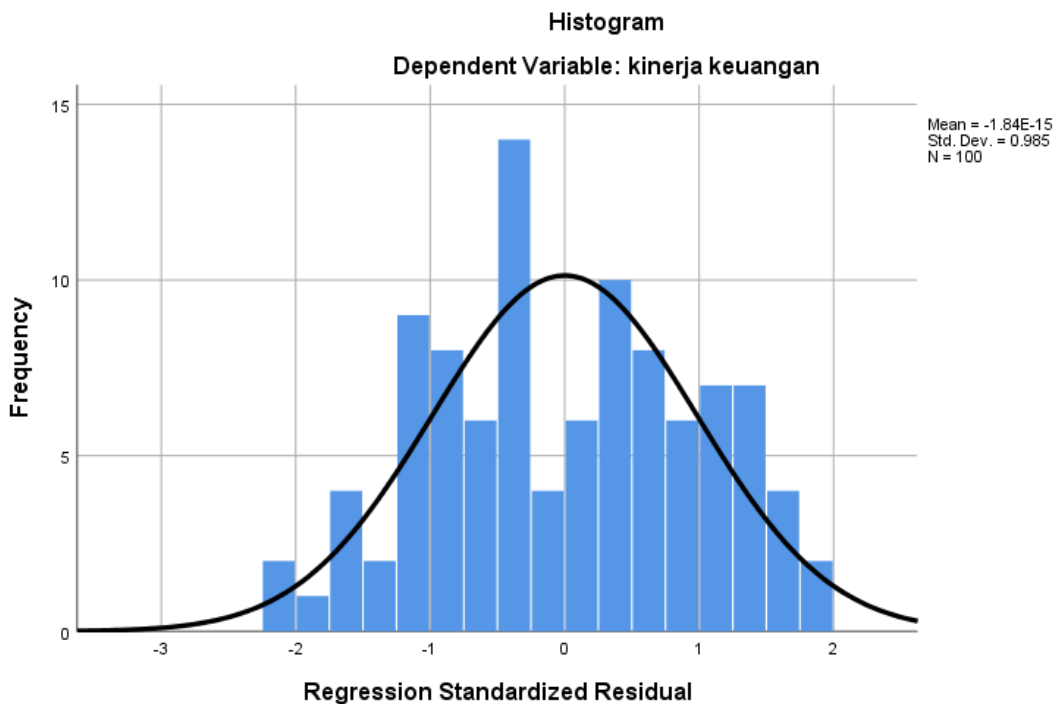
Lampiran 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Beranda

Coefficients^a

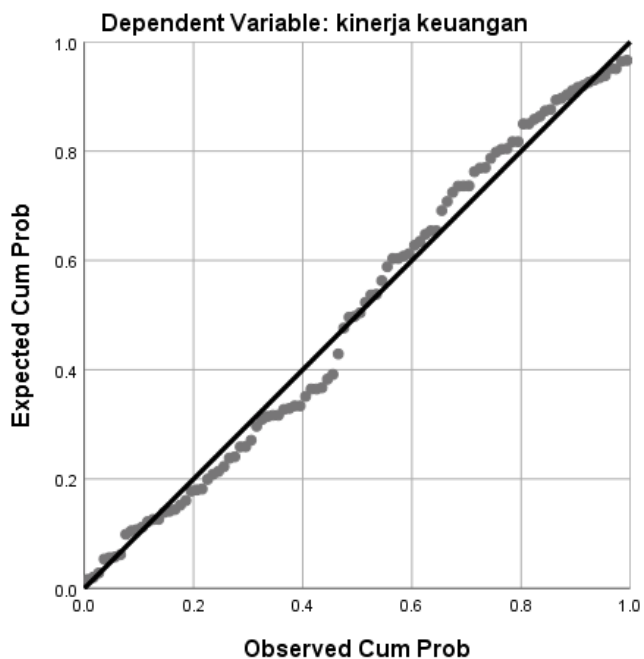
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.384	2.396		4.334	.000
	pengelolaan keuangan	.156	.064	.230	2.414	.018
	akuntabilitas	.223	.078	.276	2.857	.005
	transparansi	.128	.099	.128	1.290	.200

a. Dependent Variable: kinerja keuangan

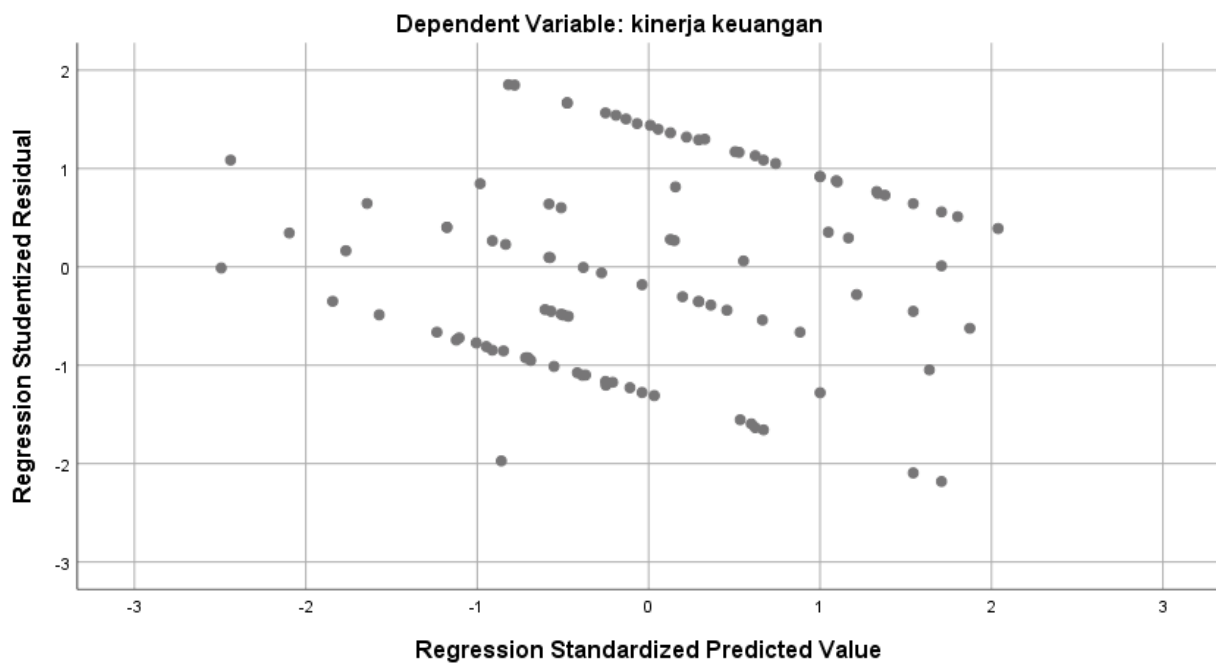
Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83487610
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.059
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.188 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.